Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Komnas HAM
2022

Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarah: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)

Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia)

Koordinator Peneliti: Handa S. Abidin

Wakil Koordinator Peneliti: Bayu Imantoro

Peneliti: Ulya Yasmine Prisandani

Asisten Peneliti: Fidela Gracia dan Soraya Dewi Kartikasari

Penerjemah: Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, Fidela Gracia, dan Soraya Dewi Kartikasari

Desain: Ulya Yasmine Prisandani dan Fidela Gracia

Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310

Pengakuan dan Ucapan Terima Kasih Terhadap Dukungan dan Kontribusi pada Penelitian Ini:

Rasa terima kasih kami ucapkan atas segala kontribusi dan dukungannya terhadap penelitian ini kepada:

Danish Institute for Human Rights (DIHR):
Sille Stidsen (Chief Adviser and Programme Manager in the Human Rights and Development Department di Danish Institute for Human Rights), Sofie Gry Fridal Hansen (Adviser in the Human Rights and Development Department di Danish Institute for Human Rights), dan Bolot Isakov (Adviser at the Danish Institute for Human Rights).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia:
Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Peneliti Komnas HAM), Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM), Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM), Rebeca Amelia Susanto (Sekretaris Tim SDGs Komnas HAM), Nur Afifa Fauzia (Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Komnas HAM), dan Zsabrina Marschsya Ayunda (Analis Kebijakan Komnas HAM).

Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic:
Askat Azarbekov (Chief of the Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).

Independent Commission of Human Rights (ICHR) Palestina:
Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of the Independent Commission of Human Rights).

Penelitian ini dibiayai oleh Danish Institute for Human Rights.

DAFTAR ISI

Daftar Tabel iv
Daftar Diagram iv
Daftar Gambar v
Daftar Singkatan Pilihan vi
Kata Pengantar vii
1. Pendahuluan 1
2. Indonesia 3
2.1. Pendahuluan 3
2.2. Pendalaman melalui Pertanyaan Tertulis, Wawancara, dan Sumber Lain 4
2.2.1. Apa HAM yang menjadi Prioritas pada TPB? 4
2.2.2. Apa Kegiatan TPB Strategis yang Telah Dilakukan? 5
2.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB? 6
2.2.4. Apa Tantangan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan TPB? 7
2.2.5. Apa Solusi dari Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan TPB? 7
2.2.6. Bagaimana Berbagi Pengalaman Antar Institusi HAM Menguntungkan Pelaksanaan dan Optimalisasi TPB? 8
2.2.7. Foto Kegiatan TPB 9
3. Kirgistan 12
3.1. Pendahuluan 12
3.2. Pendalaman melalui Pertanyaan Tertulis dan Sumber Lain 12
3.2.1. Apa HAM yang menjadi Prioritas pada TPB? 13
3.2.2. Apa Kegiatan TPB Strategis yang Telah Dilakukan? 14
3.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB? 15
3.2.4. Apa Tantangan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan TPB? 15
3.2.5. Apa Solusi dari Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan TPB? 16
3.2.6. Bagaimana Berbagi Pengalaman Antar Institusi HAM Menguntungkan Pelaksanaan dan Optimalisasi TPB? 16
3.2.7. Foto Kegiatan TPB 17
4. Palestina 19
4.1. Pendahuluan 19
4.2. Pendalaman melalui Pertanyaan Tertulis, Wawancara, dan Sumber Lain 19
4.2.1. Apa HAM yang menjadi Prioritas pada TPB? 20
4.2.2. Apa Kegiatan TPB Strategis yang Telah Dilakukan? 20
4.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB? 21
4.2.4. Apa Tantangan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan TPB? 21
4.2.5. Apa Solusi dari Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan TPB? 21
4.2.6. Bagaimana Berbagi Pengalaman Antar Institusi HAM Menguntungkan Pelaksanaan dan Optimalisasi TPB? 22
4.2.7. Foto Kegiatan TPB 23
5. Kesimpulan dan Rekomendasi 26
Daftar Pustaka 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jawaban Indonesia atas Pertanyaan Tertulis dalam Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context"	**4**
Tabel 2	Jawaban Kirgistan atas Pertanyaan Tertulis dalam Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context"	**13**
Tabel 3	Jawaban Palestina atas Pertanyaan Tertulis dalam Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context"	**20**

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Kategorisasi Kegiatan TPB Strategis Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic	**14**
Diagram 2	Sumber Data HAM dan TPB di Kirgistan	**16**
Diagram 3	Kesimpulan Berbagi Pengalaman Mengenai TPB	**26**
Diagram 4	Rekomendasi terkait Berbagi Pengalaman Mengenai TPB	**27**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pelaksanaan Webinar “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in the National Context” di mana Komnas HAM membuka acara dan perwakilan Komnas HAM turut menjadi pembicara, 22 November 2021	**9**
Gambar 2	Pelaksanaan Webinar “Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia”, 17 Desember 2021	**9**
Gambar 3	Pelaksanaan “Webinar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan”, 20 Desember 2021	**10**
Gambar 4	Pelaksanaan Webinar “Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, 21 Desember 2021	**10**
Gambar 5	Pelaksanaan Webinar “Peran Komnas HAM terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap HAM dan TPB di Indonesia”, 22 Desember 2021	**11**
Gambar 6	Diskusi Meja Bundar “Realization of Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic” yang diadakan oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, 18 Agustus 2021	**17**
Gambar 7	Webinar “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” di mana perwakilan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic menjadi pembicara, 22 November 2021	**18**
Gambar 8	Pertemuan Tim Nasional TPB Palestina di Ramallah, Maret 2019	**23**
Gambar 9	ICHR mengikuti pelatihan TPB yang diselenggarakan di Beirut, Lebanon, 9 September 2019	**24**
Gambar 10	Heba Farid pada acara UNESCO mengenai hak pemuda terkait TPB, Byblos, Lebanon, 11 September 2019	**24**
Gambar 11	Heba Farid (kedua dari kiri) mengikuti “National Evaluation Capacities Conference: Theory Based Evaluation in Practice Workshop”, Mesir, 21 Oktober 2019	**24**
Gambar 12	ICHR mengaitkan TPB dengan aduan pelanggaran HAM, Ramallah, Palestina, 17 November 2021	**25**

DAFTAR SINGKATAN PILIHAN

APF	Asia Pacific Forum of National Human Rights
DIHR	Danish Institute for Human Rights
HAM	Hak Asasi Manusia
ICHR	Independent Commission for Human Rights
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kementerian PPN / Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
NHRI	National Human Rights Institution
P4R	Partners for Review
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNDP	United Nations Development Programme
UN ESCAP	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UNESCO	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
VNR	Voluntary National Review

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan untuk mendorong terwujudnya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara supaya mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi instrumen yang sangat strategis untuk mendukung pencapaian mandat tersebut.

Sejalan dengan tujuan tersebut, salah satu peran institusi nasional hak asasi manusia (*National Human Rights Institution*/NHRI) dalam pencapaian TPB adalah mengawasi pelaksanaan SDG pada konteks nasionalnya. Pentingnya antar institusi HAM saling berbagi pengalaman mengenai TPB adalah demi mendapatkan hal baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh suatu institusi HAM, menyelesaikan persoalan yang ada yang juga dimiliki oleh institusi HAM lain, serta memperkuat solidaritas institusi HAM dalam mencari penyelesaian persoalannya secara bersama terhadap beberapa persoalan yang umumnya memiliki karakter yang serupa.

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat nasional dan regional Asia Pasifik, Komnas HAM berkomitmen menjadi Koordinator Institusi Nasional HAM seAsia Pasifik dalam Kelompok Kerja SDGs dalam GANHRI (Global Alliance of Human Rights Institutions). Salah satu kegiatan yang dikembangkan Komnas HAM dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator seAsia Pasifik adalah penyelenggaraan survei mengenai inisiatif NHRI di Wilayah Asia Pasifik dalam isu SDGs bersama DIHR.

Survei mengenai TPB dan HAM tersebut diikuti oleh 17 institusi HAM dari berbagai negara di Asia Pasifik yang tergabung dalam GANHRI dan Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM dan DIHR melakukan pendalaman ditiga negara melalui penelitian dengan judul: "**Praktik dan Pengalaman NHRI di Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.**" Penelitian yang didukung oleh DIHR ini bertujuan untuk melengkapi survei tersebut, terutama dari negara-negara yang berpartisipasi dalam webinar "*The Role of NHRIs in Monitoring SDG Achievements in Their National Context*" yang diselenggarakan oleh DIHR dan Komnas HAM pada 22 November 2021.

Komnas HAM mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para peneliti yang terlibat dalam tim penelitian yang dikoordinir oleh Handa S. Abidin dan Bayu Imantoro, yang terdiri atas Ulya Yasmine Prisandani dan Fidela Gracia, serta jajaran Komnas HAM yang terlibat dalam riset ini, yaitu Mimin Dwi Hartono, Sri Nur Fathya, Rebeca Amelia Susanto, Nur Afifa Fauzia dan Zsabrina Marschsya Ayunda. Komnas HAM mengucapkan terima kasih pula kepada DIHR atas dukungannya dalam riset

ini, terkhusus kepada Sille Stiedsen yang berhubungan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan riset ini mewakili DIHR.

Semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, khususnya Komnas HAM, DIHR maupun institusi nasional HAM lainnya dalam bentuk yang lebih kongkrit melalui berbagai aktivitas untuk mendorong pencapaian TPB.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Ketua Tim SDGs Komnas HAM RI

Sandrayati Moniaga

Komisioner Pengkajian dan Penelitian

1. Pendahuluan

Pada tahun 2020 Danish Institute for Human Rights (DIHR) bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) melakukan survei mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diikuti oleh 17 institusi HAM dari berbagai negara di Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions.[1] Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai kegiatan TPB apa yang telah mereka laksanakan, apa tantangannya, dan apa yang ingin mereka tingkatkan.[2]

Negara-negara yang berpartisipasi dalam survei tersebut adalah Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Irak, Kirgistan, Korea Selatan, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Nepal, Oman, Qatar, Selandia Baru, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.[3] Dari aspek geografis, negara-negara tersebut terletak di Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Timor Leste, dan Malaysia), Asia Timur (Korea Selatan dan Mongolia), Asia Barat (Iraq, Oman, dan Qatar), Asia Tengah (Kirgistan), Asia Selatan (Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, dan Sri Lanka), dan Benua Australia (Australia dan Selandia Baru).

Laporan ini bertujuan untuk melengkapi survei tersebut, terutama dari negara-negara yang berpartisipasi dalam webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" yang diselenggarakan oleh DIHR dan Komnas HAM pada 22 November 2021.[4] Negara-negara yang dijadikan pembahasan lebih lanjut pada laporan ini adalah Indonesia (Komnas HAM) dan Kirgistan (Institute of the Akyikatchy of the Kyrgyz Republic ***/*** Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).

Terdapat satu negara tambahan yaitu Palestina (Independent Commission for Human Rights / ICHR). ICHR sendiri bukan merupakan peserta survei yang diadakan pada tahun 2020 oleh DIHR dan Komnas HAM, namun demikian ICHR dipilih karena kesediaannya untuk terlibat dalam penelitian ini selain memang ICHR memiliki pengalaman yang menarik untuk dijelaskan di dalam laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi baru yang bermanfaat bagi institusi HAM di Asia Pasifik.

Pemilihan tiga negara yaitu Indonesia, Kirgistan, dan Palestina dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan dan ketersediaan dari institusi HAM negara-negara tersebut. Komunikasi telah diinisiasi dengan negara-negara lainnya yang juga terlibat dalam survei yang diadakan pada tahun 2020. Negara-negara

---

[1] (1) "Our Members", Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, diakses tanggal 23 Oktober 2021, asiapacificforum.net; (2) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs" (2020); dan (3) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey" (2020).

[2] (1) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs"; dan (2) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from the Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey".

[3] Lihat catatan kaki nomor 1.

[4] Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context", YouTube video, diakses tanggal 9 Desember 2021, https://www.youtube.com/watch?v=v41YMZqv0rg.

tersebut adalah Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Irak, Kirgistan, Korea Selatan, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Nepal, Oman, Qatar, Selandia Baru, Sri Lanka, Thailand, serta Timor Leste. Dari negara-negara tersebut, hanya Kirgistan yang mengisi tautan pertanyaan tertulis lanjutan yang dikirimkan melalui surat elektronik. Keterbatasan sumber daya dan juga tidak adanya pembaharuan yang cukup signifikan dari survei tahun 2020 disebutkan oleh salah satu negara menjadi alasan ketidakbersediaan partisipasi dalam kegiatan lanjutan melalui pertanyaan tertulis tersebut.[5]

Data dari Komnas HAM terutama didapatkan melalui proses wawancara yang diadakan pada 21 Desember 2021, sedangkan perolehan data dari Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic dan ICHR terutama didapatkan dari pertanyaan tertulis peneliti dengan judul "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific".[6] Peneliti juga melakukan proses wawancara kepada ICHR pada 14 Desember 2021. Pertanyaan yang ditanyakan kepada Komnas HAM, Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, dan ICHR tercermin dari judul sub-bab pada bab yang membahas masing-masing pihak tersebut di bawah ini, yaitu fokus pada tujuh hal sebagai berikut: prioritas hak asasi manusia pada TPB, kegiatan strategis TPB, pengawasan TPB, tantangan dalam TPB, optimalisasi kegiatan TPB, solusi menghadapi tantangan dalam TPB, dan manfaat berbagi pengalaman TPB antar-negara. Namun demikian, perlu disampaikan, pada penelitian ini Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic baru menjawab lima pertanyaan utama yang diberikan pada pertanyaan tertulis dengan judul "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific".[7] Dua pertanyaan susulan yang diberikan pada pertanyaan tertulis mengenai solusi untuk menghadapi tantangan pada TPB serta manfaat berbagi pengalaman TPB antar-negara belum sempat dijawab oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic.[8]

Selain itu untuk melengkapi jawaban yang diberikan pada wawancara dan pertanyaan tertulis di atas, data juga diambil dari berbagai sumber antara lain dari webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" yang diadakan pada tanggal 22 November 2021 beserta

[5] Natasha de Silva (Australian Human Rights Commission), surat elektronik kepada Ulya Yasmine Prisandani, "RE: NHRI Follow Up Survey for the Australian Human Rights Commission", 8 November 2021.

[6] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific", pertanyaan tertulis dilakukan oleh Tim Peneliti pada penelitian ini berkolaborasi dengan Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, pertanyaan tertulis dikirimkan pada tanggal 12 November 2021 dan dijawab pada tanggal 14 November 2021 oleh perwakilan Palestina dan pada tanggal 16 November 2021 oleh perwakilan Kirgistan (selanjutnya: "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific").

[7] Ibid.

[8] Ulya Yasmine Prisandani, surat elektronik kepada Askat Azarbekov (Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic), "Further Questions for Kyrgyz Ombudsman: Survey for Follow Up Study of NHRI", 16 Desember 2021.

materi presentasi dan pertanyaan tertulis yang dibagikan dalam webinar tersebut.[9]

Perlu diketahui bahwa hasil survei di atas mengenai TPB dan HAM juga telah diolah dalam laporan berjudul "Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region" yang telah dipublikasi oleh DIHR.[10] Namun demikian negara yang menjadi pembahasan pada laporan tersebut tidak meliputi Kirgistan dan Palestina.[11] Pembahasan Indonesia dilakukan dalam laporan tersebut difokuskan pada pengawasan dan perencanaan TPB dan HAM serta pembahasan mengenai HAM dan bisnis dikaitkan dengan TPB.[12]

2. Indonesia

2.1. Pendahuluan

Komnas HAM merupakan salah satu institusi HAM yang terlibat dalam survei di tahun 2020 mengenai TPB.[13] Dalam survei tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan kegiatan terkait dengan TPB, antara lain pembentukan Tim *Sustainable Development Goals* Komnas HAM oleh Sidang Paripurna serta kolaborasi dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri.[14] Permasalahan yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam menjalani kegiatan TPB adalah ketersediaan anggaran untuk menjalankan aktivitas TPB, jangka waktu keterlibatan dalam TPB yang belum terlalu lama, dan kurangnya dilibatkan oleh pemerintah dalam rencana implementasi TPB secara nasional.[15]

---

[9] (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" (n. 4); (2) Mimin Dwi Hartono, "The Role of Komnas HAM in Monitoring and Advancing SDGs Achievement in Indonesia" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021); (3) Askat Azarbekov, "Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic: Challenges and Aspirations" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021); (4) Heba Farid, "The Role of NHRIs in Monitoring SDG achievements in their national context" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021); dan (5) "Questions on SDG related Experiences since January 2020", survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti, DIHR, dan Komnas HAM, 22 November 2021.

[10] Danish Institute for Human Rights, "Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region" (2020), 12.

[11] Ibid.

[12] Ibid., 12, 14, dan 19-20.

[13] (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey" (n. 1), 1 dan 18; dan (2) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs" (n. 1).

[14] (1) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey" (n. 1), 18; dan (2) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs", (n. 1).

[15] Ibid.

2.2. Pendalaman melalui Pertanyaan Tertulis, Wawancara, dan Sumber Lain

Untuk memperdalam hasil survei DIHR dan Komnas HAM 2020, peneliti melakukan wawancara dengan Komnas HAM yang diwakili oleh Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM) dan Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM). Wawancara tersebut dilaksanakan pada 21 Desember 2021.[16] Di samping itu, pendalaman juga dilakukan berdasarkan materi yang disampaikan pada webinar-webinar terkait TPB yang diselenggarakan pada bulan Desember 2021.

Dua orang perwakilan Komnas HAM yaitu Zsabrina Marchsya Ayunda (Analis Kebijakan Komnas HAM) dan Nur Afifa Fauzia (Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Komnas HAM) juga menjawab pertanyaan tertulis yang dibagikan dalam webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" yang diselenggarakan pada 22 November 2021. Adapun jawaban yang disampaikan adalah sebagai berikut:[17]

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah institusi HAM Anda telah melaksanakan kegiatan terkait dengan TPB sejak Januari 2020?	Ya
2.	Apakah menurut Anda institusi HAM Anda dapat meningkatkan kontribusi terhadap proses pengawasan TPB?	Ya
3.	Apakah institusi HAM Anda telah berkontribusi terhadap perencanaan TPB (Rencana Nasional atau proses / dokumen serupa)?	Ya
4.	Apakah menurut Anda institusi HAM Anda dapat meningkatkan kontribusi terhadap proses perencanaan TPB?	Ya

Tabel 1 **Jawaban Indonesia atas Pertanyaan Tertulis dalam Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context"**

2.2.1. Apa HAM yang menjadi Prioritas pada TPB?

Mimin Dwi Hartono menyatakan fokus jenis HAM pada TPB yang menjadi perhatian utama Komnas HAM bukan pada prioritas kategori HAM tertentu, namun lebih kepada bagaimana pengarusutamaan HAM secara keseluruhan dan pengintegrasiannya ke dalam TPB.[18] Hartono menyampaikan

[16] Mimin Dwi Hartono (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM) dan Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM), "DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia", wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti (Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, dan Fidela Gracia) dengan Mimin Dwi Hartono dan Sri Nur Fathya pada tanggal 21 Desember 2021 (selanjutnya: "DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia").

[17] "Questions on SDG related Experiences since January 2020" (n. 9), jawaban Zsabrina Marchsya Ayunda (Analis Kebijakan Komnas HAM) dan Nur Afifa Fauzia (Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Komnas HAM). Pertanyaan dan jawaban dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris.

[18] DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia (n. 16).

bahwa HAM merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana hal ini menjadi prinsip HAM, sehingga dalam konteks TPB perspektif HAM bersifat saling terkait, saling tergantung, dan tidak dapat berdiri sendiri.[19] Fathya menambahkan, Komnas HAM juga berorientasi pada kegiatan untuk beradaptasi dan pemulihan di saat dan pasca pandemi COVID-19.[20]

2.2.2. Apa Kegiatan TPB Strategis yang Telah Dilakukan?

Kegiatan strategis yang telah dilakukan Komnas HAM adalah peran Komnas HAM dalam berbagai forum internasional.[21] Misalnya Komnas HAM terlibat aktif pada Asia-Pacific Forum on Sustainable Development yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).[22] Selain itu, Komnas HAM juga terlibat pada kegiatan Partners for Review (P4R).[23]

Komnas HAM juga melakukan kolaborasi dengan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), di mana kolaborasi tersebut sering dipromosikan dalam berbagai forum.[24] Kolaborasi dengan UNESCO antara lain dalam bentuk pembuatan *web-based tools* TPB yang salah satunya bermanfaat untuk pengawasan pelaksanaan TPB.[25] Hartono mengingatkan masih ada yang perlu ditingkatkan dalam *web-based tools* TPB tersebut misalnya perluasan TPB ke semua tujuan dan membuatnya lebih *update* dengan perkembangan yang ada.[26]

Hal ini dikatakan strategis karena melalui kegiatan ini kinerja Komnas HAM dapat diketahui pada tingkat internasional.[27] Melalui kegiatan-kegiatan ini berbagai kesempatan kolaborasi dapat bermunculan.[28] Kegiatan strategis ini sudah sesuai dengan salah satu misi Komnas HAM yakni “Memperkuat peran

---

[19] Ibid., Lihat juga: Sandrayati Moniaga, “Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia” (Presentasi PowerPoint pada Webinar “Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Tinjauan Umum Sustainable Development Goals dan HAM”) (17 Desember 2021), 4.
[20] Ibid.; DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia (n. 16).
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Lihat antara lain: (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” (n. 4), menit ke 42-43; (2) Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2020, “Laporan Tahunan Komnas HAM 2020” (2021), 83-84; (3) Komnas HAM, “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” (2021), 12-13; dan (4) Webinar “Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, 20 Desember 2021, pernyataan Mimin Dwi Hartono, menit ke 78-79. Lihat juga: Danish Institute for Human Rights, “Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region” (n. 10), 12.
[26] Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context”, menit ke 42-43.
[27] Ibid.
[28] Ibid. Lihat juga Sub-bab 2.2.6. pada bab ini.

strat Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region egis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional".[29] Peran Komnas HAM di atas merupakan salah satu "praktik baik" yang dijalankan oleh Komnas HAM.[30] Hartono mengklasifikasikan praktik baik tersebut dalam 4 bentuk yaitu kepercayaan, reputasi, kerja sama, dan jejaring.[31]

2.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB?

Kontribusi pengawasan Komnas HAM pada TPB dalam perspektif HAM dilakukan antara lain melalui proses VNR di mana Komnas HAM memberikan komentar tertulis terhadap draf VNR yang dibuat oleh pemerintah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN / Bappenas]).[32] Hartono memberikan komentar menarik mengenai VNR yaitu keinginan Komnas HAM agar pemerintah tidak berhenti pada pelaporan jumlah rekomendasi Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM, namun lebih kepada tindakan pemerintah terhadap rekomendasi tersebut.[33]

> Mimin Dwi Hartono (2021): "Kita maunya lebih dielaborasi, katakanlah ketika tahun 2020 Komnas HAM menerima 2000 sekian aduan, kemudian dari 2000 sekian aduan itu kita sampaikan rekomendasi pemerintah itu 200 kasus. Nah seperti apa respon pemerintah.

Komnas HAM telah memanfaatkan kesempatan untuk terlibat pada penyusunan VNR sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terkait apakah rekomendasi Komnas HAM dijalankan oleh pemerintah.[34] Selain itu, Hartono menyampaikan pemberian waktu yang pendek untuk menanggapi VNR dikarenakan informasi yang mendadak dengan tenggat waktu yang singkat menjadi kendala untuk memberikan tanggapan yang maksimal.[35] Hartono juga menyampaikan kedepannya Komnas HAM perlu membuat laporan VNR versi Komnas HAM.[36] Komnas HAM juga terlibat dalam kegiatan konsultasi publik pada Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2021-2024.[37] Namun dikarenakan

---

[29] Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (n. 25), 3.
[30] Mimin Dwi Hartono, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia") (20 Desember 2021), 11.
[31] Ibid.
[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] DIHR Project Interview – NHRI Role with Indonesia (n. 16).
[35] Ibid.
[36] Ibid.
[37] Ibid.

tenggat waktu yang pendek yang diberikan oleh pemerintah, Komnas HAM tidak memberikan komentar tertulis.[38] Padahal aspek HAM relevan sekali dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2021-2024 tersebut.[39] Bentuk pengawasan lain dapat juga dilakukan dengan mengembangkan *web-based tools* yang dibuat oleh Komnas HAM bersama dengan UNESCO.[40]

2.2.4. Apa Tantangan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan TPB?

Hartono menyampaikan tantangan pada Komnas HAM ketika melakukan kegiatan TPB adalah pengarusutamaan TPB pada internal Komnas HAM.[41] TPB masih dianggap beban, TPB masih dianggap tidak mudah untuk dimengerti serta dianggap bukan merupakan bagian dari pekerjaan.[42] Tantangan lainnya adalah bagaimana membuat institusi pemerintahan lainnya untuk semakin memperhatikan ajakan kolaborasi Komnas HAM.[43] Dahulu kehadiran pejabat eselon tertinggi pada acara yang diundang oleh Komnas HAM jarang terjadi, namun sekarang disampaikan bahwa tanggapannya sudah semakin membaik.[44] Sebagai contoh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto hadir sebagai pembicara dalam webinar "Peran Komnas HAM terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap HAM dan TPB di Indonesia" yang dilaksanakan pada 22 Desember 2021.[45]

2.2.5. Apa Solusi dari Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan TPB?

Solusi dalam memperkuat pengarusutamaan TPB pada internal Komnas HAM adalah dengan membuat TPB menjadi sesuatu yang praktis dan mudah untuk dilaksanakan dalam internal Komnas HAM.[46] Oleh karena itu, Hartono menyampaikan perlunya kerangka kerja yang mengakomodir kebutuhan ini.[47] Selain itu, Hartono juga menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas secara rutin dalam rangka memperkuat pengetahuan Komnas HAM terkait TPB.[48] Hairansyah (Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM / Komisioner

---

[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Ibid. Lihat juga: Danish Institute for Human Rights, "Working with the 2030 Agenda to Promote Humans Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region" (n. 10), 12.
[41] Ibid.
[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] Ibid.
[45] Komnas HAM, "Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", YouTube video, menit ke 27-48, diakses tanggal 9 Januari 2021, http://www.youtube.com/watch?v=xJI6vfguTow.
[46] DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia (n. 16).
[47] Ibid.
[48] Ibid.

Mediasi) menyatakan pengarusutamaan TPB di Komnas HAM "tidak hanya [dilaksanakan] *by accident* saja tetapi harus *by design* dibuat sedemikian rupa dalam kerja Komnas HAM secara keseluruhan".[49]

Selain itu, Hartono turut membahas mengenai persoalan anggaran dengan mengatakan bahwa anggaran perlu dilihat dari perspektif bagaimana sumber daya manusia melakukan pengelolaannya dengan maksimal, dan bukan hanya terkait dengan besaran anggaran tersebut.[50] Dalam kesempatan yang berbeda, Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian), manyatakan TPB bersifat *multi-stakeholder* dan membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak.[51] Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, pemerintah butuh sektor yudikatif, sektor legislatif, serta perlu meningkatkan kolaborasi TPB dengan elemen masyarakat, seperti dengan masyarakat sipil, asosiasi, *multinational corporations*, dan juga perguruan tinggi.[52]

2.2.6. Bagaimana Berbagi Pengalaman Antar Institusi HAM Menguntungkan Pelaksanaan dan Optimalisasi TPB?

Pada prinsipnya, menurut Fathya, berbagi pengalaman sudah pasti merupakan hal yang menguntungkan.[53] Hartono memberikan contoh misalnya kerja sama dengan DIHR dimulai ketika pertemuan di forum internasional yang berlanjut pada pembuatan nota kesepahaman antara dua institusi HAM tersebut serta pelaksanaan aktivitas yang saling menguntungkan para pihak.[54] Begitu juga dengan kolaborasi dengan UNESCO yang juga diawali dengan pertemuan di suatu forum.[55] Disampaikan juga bahwa kolaborasi nasional tidak kalah penting.[56] Hartono juga turut menyatakan dengan semakin mudahnya komunikasi melalui daring, Komnas HAM semakin memperoleh manfaat untuk mendapatkan pengetahuan lebih mengenai TPB.[57]

---

[49] Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia", 20 Desember 2021, pernyataan Hairansyah, menit ke 118-120.
[50] DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia (n. 16).
[51] Komnas HAM, "Podcast #EPS 32: SDGs dan Anak Muda, YouTube video", menit ke 19-20, diakses tanggal 29 Desember 2021, https://www.youtube.com/watch?v=LJPx_cbogYU. Lihat juga: Danish Institute for Human Rights, "Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region" (n. 10), 14.
[52] Ibid.
[53] DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia (n. 16).
[54] Ibid.
[55] Ibid.
[56] Ibid.
[57] Ibid.

2.2.7. Foto Kegiatan TPB



Gambar 1	**Pelaksanaan Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" di mana Komnas HAM membuka acara dan perwakilan Komnas HAM turut menjadi pembicara, 22 November 2021.** Sumber: Koleksi Tim Peneliti.



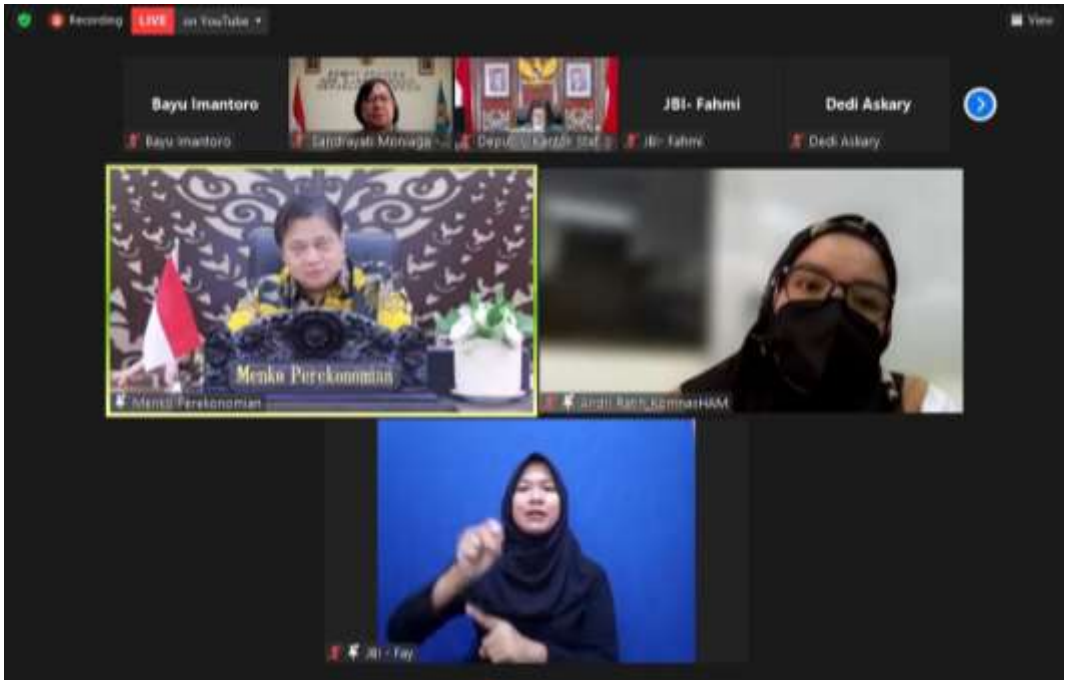
Gambar 2	**Pelaksanaan Webinar "Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia", 17 Desember 2021.** Sumber: Koleksi Tim Peneliti.



Gambar 3	**Pelaksanaan Webinar "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan", 20 Desember 2021.** Sumber: Koleksi Tim Peneliti.



Gambar 4	**Pelaksanaan Webinar "Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", 21 Desember 2021.** Sumber: Koleksi Tim Peneliti.



Gambar 5	**Pelaksanaan Webinar "Peran Komnas HAM terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap HAM dan TPB di Indonesia", 22 Desember 2021.** Sumber: Koleksi Tim Peneliti.

3. Kirgistan

3.1. Pendahuluan

Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic mengawasi kinerja pemerintah terkait TPB dan tidak melaksanakan kegiatan TPB secara langsung.[58] Target yang menjadi fokus Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic adalah salah satunya Target 16.[59] Kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic salah satunya adalah minimnya pengetahuan TPB yang berdampak kepada ketidakoptimalan penggunaan alat dan metode mengenai TPB.[60] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam pelaksanaan TPB.[61]

3.2. Pendalaman melalui Pertanyaan Tertulis dan Sumber Lain

Untuk memperdalam hasil survei DIHR dan Komnas HAM tahun 2020, Tim Peneliti mengolah jawaban pada "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" yang diberikan kepada Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic yang diwakili oleh Askat Azarbekov (Chief of the Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).[62]

Lebih lanjut, Tim Peneliti juga mengolah antara lain dari keterangan yang diberikan dalam webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" yang diadakan pada 22 November 2021 berikut jawaban pertanyaan tertulis yang diisi oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic serta materi presentasi Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic.[63]

---

[58] (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from the Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey" (n. 1), 15; dan (2) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs" (n. 1).

[59] (1) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from the Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey", 15-16; dan (2) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs".

[60] (1) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from the Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey", 15; dan (2) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs".

[61] (1) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "Summary of Respondents from the Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey", 16; dan (2) Ibid., Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "NHRI Survey on SDGs".

[62] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).

[63] (1) Askat Azarbekov, "Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic: Challenges and Aspirations" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021); (2) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" (n. 4); (3) "Questions on SDG related Experiences since January 2020" (n. 9), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).

Pertanyaan tertulis yang dibagikan dalam sesi webinar tersebut dijawab oleh perwakilan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic sebagai berikut:[64]

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah institusi HAM Anda telah melaksanakan kegiatan terkait dengan TPB sejak Januari 2020?	Ya
2.	Apakah menurut Anda institusi HAM Anda dapat meningkatkan kontribusi terhadap proses pengawasan TPB?	Ya
3.	Apakah institusi HAM Anda telah berkontribusi terhadap perencanaan TPB (Rencana Nasional atau proses / dokumen serupa)?	Ya
4.	Apakah menurut Anda institusi HAM Anda dapat meningkatkan kontribusi terhadap proses perencanaan TPB?	Ya

Tabel 2 **Jawaban Kirgistan atas Pertanyaan Tertulis dalam Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context"**

3.2.1. Apa HAM yang menjadi Prioritas pada TPB?

Terdapat setidaknya dua poin penting yang disampaikan oleh Azarbekov ketika ditanya mengenai TPB apa yang menjadi prioritas Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic. Pertama, Azarbekov menggarisbawahi pentingnya keseluruhan hak dan kebebasan seseorang serta mengaitkannya dengan seluruh indikator yang ada pada TPB.[65] Perlu diketahui, Kirgistan mulai memberikan perhatian pada 17 TPB sejak tahun 2016.[66] Kedua, Azarbekov melihat pelaksanaan TPB perlu dilakukan berdasarkan hukum nasional dan standar internasional.[67]

Penelaahan lebih lanjut mengenai fokus HAM dan TPB dalam kegiatan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic dapat dilihat dari daftar kegiatan yang telah diunggah di laman Facebook.[68] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HAM secara umum, namun belum banyak mengaitkannya secara eksplisit dengan TPB.[69] Akan tetapi, Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic pernah melaksanakan diskusi meja bundar mengenai pelaksanaan TPB pada 18 Agustus 2021.[70]

---

[64] Ibid., "Questions on SDG related Experiences since January 2020", jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic). Pertanyaan dan jawaban dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris.
[65] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).
[66] Askat Azarbekov, "Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic: Challenges and Aspirations" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021), 2.
[67] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).
[68] Kegiatan-kegiatan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic secara berkala diunggah melalui media sosial Facebook: https://www.facebook.com/ombudsmankr.
[69] Ibid.
[70] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, "Diskusi meja bundar - Realization of Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic", 18 Agustus 2021, diakses tanggal 29 Desember 2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=2933200863559751&set=pcb2933201240226380.

3.2.2. Apa Kegiatan TPB Strategis yang Telah Dilakukan?

Pada tahun 2021, atas usaha yang dilakukan oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic berhasil dilibatkan dalam Coordination Committee for Adaptation, Implementation, and Monitoring of the SDGs yang berfungsi untuk melakukan eksekusi kegiatan TPB dalam hal adaptasi, implementasi, dan pengawasan.[71] Hal ini dapat terjadi karena inisiatif Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic yang menyediakan data mengenai beberapa indikator pada Tujuan 16. Perlu diketahui, Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic tidak masuk secara formal dalam komite tersebut.[72]

Paparan lebih lanjut mengenai kegiatan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic yang berkaitan dengan TPB dijabarkan dalam webinar *"*The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context*"* yang diadakan pada tanggal 22 November 2021.[73] Secara umum, kegiatan terkait dengan TPB yang disampaikan dalam webinar tersebut adalah antara lain sebagai berikut:



Diagram 1	**Kategorisasi Kegiatan TPB Strategis Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic.** Sumber: Askat Azarbekov.[74]

[71] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).
[72] Ibid.
[73] Diolah berdasarkan: (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" (n. 4), menit ke 24-37; dan (2) Askat Azarbekov, "Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic: Challenges and Aspirations" (Presentasi PowerPoint pada webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021).
[74] (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in Their National Context" (n. 4), menit ke 29-30; dan (2) Askat Azarbekov, "Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic: Challenges and Aspirations" (Presentasi PowerPoint pada webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021).

3.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB?

Peran yang diambil oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic dalam pengawasan TPB adalah menyampaikan laporan HAM dari masyarakat yang dikirim kepada Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic yang lalu dikaitkan dengan TPB.[75] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic juga turut berperan dalam pengumpulan data, perluasan data, dan pemberian rekomendasi sebagaimana disampaikan di atas. Terkait dengan pengumpulan data, Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic berhasil menemukan persoalan ketidakakuratan data dan turut membantu pemerintah untuk memperbaiki data ini.[76] Kontribusi Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic dalam kegiatan ini adalah menampilkan data yang utuh sehingga pemerintah bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam pelaksanaan implementasi TPB, khususnya Tujuan 16.10. dan 16.3.[77] Kualitas data yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan Kirgistan pada tingkat internasional.[78]

3.2.4. Apa Tantangan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan TPB?

Komunikasi tidak maksimal yang berdampak pada ketidakakuratan data dan keefektifan dalam pengawasan TPB menjadi persoalan yang digarisbawahi oleh Azarbekov.[79] Saat ini dinyatakan persoalan komunikasi dihadapi antara berbagai institusi pemerintah.[80] Perbedaan tanggung jawab fungsional juga sebenarnya mengarah pada hasil yang berbeda.[81] Sebagaimana disebutkan sebelumnya, data terkait HAM dan TPB Tujuan 16.3. dan 16.10. merupakan gabungan dari antara lain:

[75] "Questions on SDG related Experiences since January 2020" (n. 9), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).
[76] Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" (n. 4), menit ke 24-27.
[77] Ibid., menit ke 28-29.
[78] Ibid., menit ke 29-30.
[79] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).
[80] Ibid.
[81] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).



Diagram 2	**Sumber Data HAM dan TPB di Kirgistan.** Sumber: Askat Azarbekov.[82]

3.2.5. Apa Solusi dari Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan TPB?

Berbeda dengan Komnas HAM dan ICHR di mana peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan mengenai solusi dari tantangan dalam menghadapi TPB secara langsung, jawaban pada sub-bab ini didapatkan secara tidak langsung. Apabila kita membahas mengenai kontribusi Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic pada kegiatan TPB, Azarbekov menyatakan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap proses terkait TPB.[83] Contoh nyata yang dijelaskan oleh Azarbekov adalah ketika Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic memperbaiki kualitas data HAM kepada pemerintah.[84] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi dan analisis mengenai persoalan HAM kepada pemerintah.[85]

3.2.6. Bagaimana Berbagi Pengalaman Antar Institusi HAM Menguntungkan Pelaksanaan dan Optimalisasi TPB?

Sama seperti dengan Sub-bab 3.2.5., jawaban pertanyaan mengenai berbagi pengalaman tidak didapatkan secara langsung. Azarbekov dalam konteks nasional mendukung kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan

[82] Diolah berdasarkan: Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” (n. 4), menit ke 78-80.
[83] “Questions on SDG related Experiences since January 2020” (n. 9), jawaban Askat Azarbekov (Ketua Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic).
[84] Ibid.
[85] Ibid.

institusi lain demi meningkatkan kualitas laporan secara internasional.[86] Keperluan pengembangan mekanisme yang menjadi wadah untuk bertukar informasi terkait pencapaian TPB disampaikan juga oleh Azarbekov.[87]

Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic pada tahun 2017 juga telah berperan dalam mendirikan Eurasian Ombudsman Alliance.[88] Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Eurasian Ombudsman Alliance adalah mengadakan acara yang dapat dikategorikan sebagai acara berbagi pengalaman, seperti konferensi internasional dengan judul “Human Rights Protection in Eurasia: Exchange of the Best Practices of Ombudspersons” yang diadakan pada tanggal 17 November 2020.[89]

3.2.7. Foto Kegiatan TPB



Gambar 6	**Diskusi meja bundar "Realization of Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic" yang diadakan oleh Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, 18 Agustus 2021.** Sumber: Laman Facebook Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic.[90]

[86] Diolah berdasarkan: Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” (n. 4), menit ke 34-35.
[87] Ibid.
[88] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, “The IV meeting of the Eurasian 2020 Eurasian Alliance”, konten Facebook Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, 18 November 2020, diakses tanggal 29 Desember 2021, https://www.facebook.com/ombudsmankr.
[89] Ibid.
[90] Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic, “Diskusi meja bundar - Realization of Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic”, 18 Agustus 2021, diakses tanggal 29 Desember 2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=2933200863559751&set=pcb.2933201240226380 (n. 70).



Gambar 7	**Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" di mana perwakilan Ombudsman Office of the Kyrgyz Republic menjadi pembicara, 22 November 2021.** Sumber: Koleksi Tim Peneliti.

4. Palestina

4.1. Pendahuluan

Seperti yang disampaikan pada Bab Pendahuluan, Palestina belum masuk di dalam hasil survei DIHR dan Komnas HAM tahun 2020, namun Palestina memiliki pengalaman menarik ketika melakukan pelaksanaan kegiatan TPB yang akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

4.2. Pendalaman melalui Pertanyaan Tertulis, Wawancara, dan Sumber Lain

Tim Peneliti mengirimkan pertanyaan tertulis dan melakukan wawancara kepada ICHR yang diwakili oleh Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of ICHR). Sama seperti Kirgistan, Tim Peneliti akan melihat hasil jawaban Farid berdasarkan "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific".[91] Pertanyaan yang ditanyakan kepada Palestina sama seperti yang ditanyakan kepada Kirgistan, namun ketujuh pertanyaan secara keseluruhan dijawab oleh Palestina.[92] Wawancara sendiri dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021.[93] Selain itu, peneliti juga mengolah keterangan yang disampaikan dalam webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context",[94] dan Farid sebagai perwakilan ICHR juga mengirimkan dokumentasi kegiatan-kegiatan terkait TPB kepada Tim Peneliti melalui surat elektronik.[95] Farid juga memberikan jawaban atas pertanyaan tertulis yang ditanyakan dalam webinar sebagai berikut:[96]

[91] Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of the ICHR), "Palestine's ICHR Zoom Interview", wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti (Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, dan Fidela Gracia) dengan Heba Farid pada tanggal 14 Desember 2021 (selanjutnya: "Palestine's ICHR Zoom Interview").
[92] Ibid.
[93] Ibid.
[94] Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" (n. 4).
[95] Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of the ICHR), surat elektronik kepada Ulya Yasmine Prisandani, "RE: Follow-Up Interview & List of Question for 14 December 2021", 17 Desember 2021.
[96] "Questions on SDG related Experiences since January 2020" (n. 9), jawaban Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of ICHR). Pertanyaan dan jawaban dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah institusi HAM Anda telah melaksanakan kegiatan terkait dengan TPB sejak Januari 2020?	Ya
2.	Apakah menurut Anda institusi HAM Anda dapat meningkatkan kontribusi terhadap proses pengawasan TPB?	Ya
3.	Apakah institusi HAM Anda telah berkontribusi terhadap perencanaan TPB (Rencana Nasional atau proses / dokumen serupa)?	Ya
4.	Apakah menurut Anda institusi HAM Anda dapat meningkatkan kontribusi terhadap proses perencanaan TPB?	Ya

Tabel 3 **Jawaban Palestina atas Pertanyaan Tertulis dalam Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context"**

4.2.1. Apa HAM yang menjadi Prioritas pada TPB?

Pada prinsipnya Farid menyampaikan ICHR terbuka terhadap semua aspek TPB.[97] Dalam jawaban pertanyaan tertulis, Farid menjawab bahwa ICHR menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam hampir semua proses terkait TPB nasional.[98] Namun dalam praktiknya, ICHR lebih banyak terlibat dalam Tujuan 16 pada tim TPB nasional Palestina, meskipun juga tergabung dalam beberapa tim TPB nasional untuk Tujuan lainnya.[99] Dalam kaitannya dengan Tujuan 16, ICHR terlibat dalam rencana aksi tim nasional dan dalam pembuatan laporan tahunan.[100]

4.2.2. Apa Kegiatan TPB Strategis yang Telah Dilakukan?

ICHR bukan hanya berperan sebagai institusi HAM tingkat nasional Palestina, namun juga merupakan ombudsman Palestina pada tingkat nasional.[101] Farid menyebutkan 9 kegiatan TPB yang telah dilakukan sebagaimana dirangkum sebagai berikut: penyedia data indikator TPB, anggota Tujuan 16 di tingkat nasional, pengarusutamaan konten TPB di Palestina, perlindungan masyarakat marginal, kolaborasi dengan lembaga nasional lain yang berujung pada terbitnya buku saku indikator TPB, dan sisa kegiatan lainnya fokus pada kegiatan terkait dengan aktualisasi dan peningkatan kapasitas.[102]

[97] Palestine's ICHR Zoom Interview (n. 91).
[98] "Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific" (n. 6), jawaban Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of ICHR).
[99] Ibid.
[100] Ibid.
[101] Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context" (n. 4), menit ke 15-16.
[102] Ibid.

4.2.3. Bagaimana Peran dalam Melakukan Pengawasan TPB?

Proses pengawasan TPB yang dilakukan ICHR dapat diklasifikasikan menjadi pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Untuk pengawasan secara langsung terkait dengan TPB, ICHR melakukan kegiatan sebagai berikut: penyertaan TPB pada rencana strategis, pemberian data TPB, pengembangan penghubungan *database* pengaduan HAM dan TPB, dan pengembangan instrumen HAM berbasis TPB.[103] Untuk pengawasan secara tidak langsung terhadap TPB, ICHR melakukan kegiatan sebagai berikut: analisis anggaran pemerintah berdasarkan HAM, penerimaan aduan HAM, pengolahan data HAM, dan pengawasan HAM secara periodik.[104] Dalam webinar dan wawancara, Farid juga menekankan bahwa pendekatan yang diambil dalam proses pengawasan bukan hanya fokus terhadap jumlah pelaporan / keluhan yang diterima oleh ICHR.[105] Namun demikian, aspek latar belakang yang menjadi asal mula dari pelaporan tersebut juga menjadi perhatian dari ICHR.[106]

4.2.4. Apa Tantangan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan TPB?

Secara eksternal tantangan yang dihadapi ICHR adalah adanya kesan bahwa ICHR memiliki peran terbatas pada Indikator 16.a.1. dan tidak ada kaitannya dengan TPB secara umum (Agenda 2030).[107] Secara internal tantangan yang dihadapi adalah penuhnya pekerjaan dari staf ICHR dan adanya anggapan pelaksanaan TPB adalah pekerjaan tambahan.[108] Selain itu, ICHR juga memiliki keterbatasan untuk peningkatan kapasitas terkait dengan partisipasi kegiatan tingkat internasional.[109]

TPB dan HAM sama-sama saling terkait menurut Farid, namun Farid memberikan catatan mengenai HAM yang lebih luas jangkauannya daripada TPB.[110] Sebagai dampak dari hal tersebut, tidak semua persoalan HAM dapat terjangkau oleh TPB.[111]

4.2.5. Apa Solusi dari Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan TPB?

---

[103] Ibid.
[104] Ibid.
[105] (1) Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” (n. 4), menit ke 12-14; dan (2) Palestine’s ICHR Zoom Interview (n. 91).
[106] Ibid.
[107] Palestine’s ICHR Zoom Interview (n. 91).
[108] Ibid.
[109] Ibid.
[110] Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” (n. 4), menit ke 19-20.
[111] Ibid.

Dalam sesi wawancara, Farid menyatakan pentingnya lembaga nasional terkait TPB lainnya untuk menyadari bahwa peran ICHR sebetulnya lebih dari indikator 16.a.1. saja.[112] Farid dalam kesempatan yang berbeda juga menjelaskan perlunya pemangku kepentingan di tingkat nasional Palestina untuk memahami peran ICHR dan Agenda 2030.[113] Mengenai tantangan internal terkait penuhnya pekerjaan staf ICHR, Farid menyatakan pentingnya ICHR melibatkan staf dalam kegiatan Agenda 2030 serta adanya bentuk pengakuan kepada staf yang telah terlibat dalam kegiatan ini.[114]

Mengenai persoalan anggaran, Farid menyatakan ICHR tidak didanai oleh pemerintah Palestina terkait dengan aktualisasi peningkatan kapasitas TPB tingkat internasional dan pendanaan tergantung dari enam negara Eropa.[115] Farid tidak menjelaskan solusi untuk hal ini, namun menekankan keberlangsungan kegiatan ini tidak baik apabila hanya tergantung dari bantuan pihak ketiga.[116]

4.2.6. Bagaimana Berbagi Pengalaman Antar Institusi HAM dapat Menguntungkan Pelaksanaan dan Optimalisasi TPB?

Dalam jawabannya ketika wawancara, Farid menyatakan mayoritas pengetahuan TPB yang didapatkan adalah dari berbagi pengalaman di tingkat internasional maupun regional.[117] Secara spesifik, Farid juga menjelaskan contoh pengalaman yang didapatkan dari UNDP mengenai pengawasan TPB yang berpaku pada “tidak ada yang ditinggalkan di belakang”.[118]

> Heba Farid (2021): “Jadi ketika Anda menemukan beberapa konsep yang tidak Anda miliki dan Anda dapat menemukan manfaat memiliki konsep yang jelas tentang sesuatu yang terkait dengan TPB atau topik lain dari perspektif pemantauan dan evaluasi dan pembelajaran dan Anda dapat menemukan lingkungan yang tepat untuk mengadopsi itu, sehingga Anda akan mengadopsinya dengan mudah. Jadi dengan terpapar oleh pengalaman lain membuat Anda lebih mudah untuk belajar melalui imitasi dan melalui pembelajaran bersama, saya pikir.”

[112] Palestine’s ICHR Zoom Interview (n. 91).
[113] Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM, “The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context” (n. 4), menit ke 68-70.
[114] (1) “Follow Up Study on Komnas HAM’s Survey on NHRIs in Asia Pacific” (n. 6), jawaban Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of ICHR); dan (2) Palestine’s ICHR Zoom Interview (n. 91).
[115] Ibid., Palestine’s ICHR Zoom Interview.
[116] Ibid.
[117] Ibid.
[118] Ibid.

Dari pengalaman tersebut, ICHR mengembangkan metode “tidak ada yang ditinggalkan di belakang” khas Palestina dalam TPB.[119] Pengalaman spesifik lainnya adalah penguatan sistem *database* HAM di mana ICHR mendapatkan banyak inspirasi berharga dari Danish Parliamentary Ombudsman.[120] Farid juga menutup sesi wawancara dengan pernyataan bahwa perkembangan yang ada pada ICHR saat ini merupakan hasil dari kegiatan berbagi pengalaman yang telah diikutinya selama ini.[121]

4.2.7. Foto Kegiatan TPB



Gambar 8	**Pertemuan Tim Nasional TPB Palestina di Ramallah, Maret 2019.** Sumber: Heba Farid.[122]

[119] Ibid.
[120] Ibid.
[121] Ibid.
[122] Heba Farid (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of the ICHR), surat elektronik kepada Ulya Yasmine Prisandani, “RE: Follow-Up Interview & List of Question for 14 December 2021”, 17 Desember 2021 (n. 95).



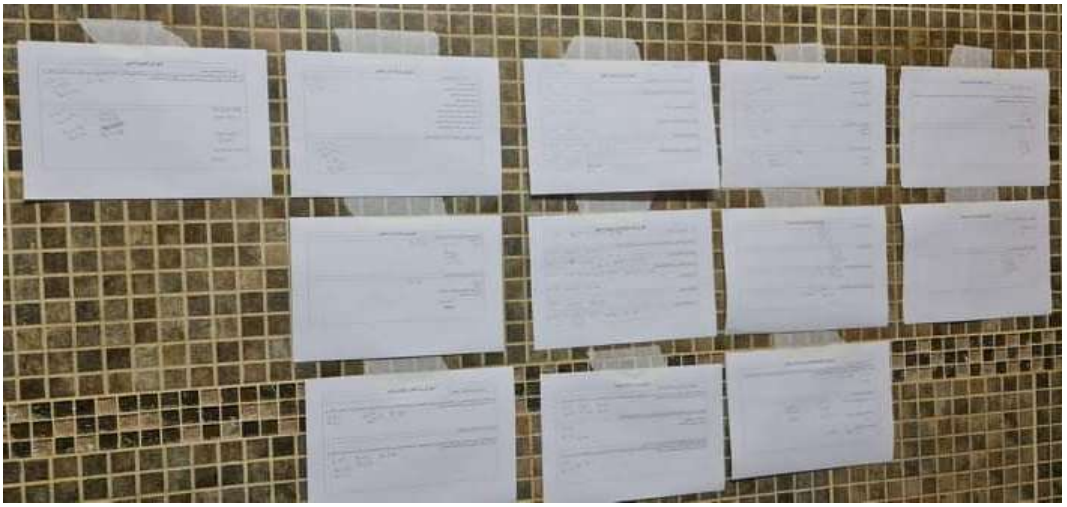


Gambar 9	**ICHR mengikuti pelatihan TPB yang diselenggarakan di Beirut, Lebanon, 9 September 2019.** Sumber: Heba Farid[123]	**Gambar 10**	**Heba Farid pada acara UNESCO mengenai hak pemuda terkait TPB di Byblos, Lebanon, 11 September 2019.** Sumber: Heba Farid[124]



Gambar 11	**Heba Farid (kedua dari kiri) mengikuti "National Evaluation Capacities Conference: Theory Based Evaluation in Practice Workshop", Mesir, 21 Oktober 2019.** Sumber: Heba Farid.[125]

[123] Ibid.
[124] Ibid.
[125] Ibid.



Gambar 12	**ICHR mengaitkan TPB dengan aduan pelanggaran HAM, Ramallah, Palestina, 17 November 2021.** Sumber: Heba Farid.[126]

[126] Ibid.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Saling berbagi pengalaman mengenai TPB penting untuk dilakukan oleh institusi HAM. Pertama, berbagi pengalaman bermanfaat untuk mendapatkan hal baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh suatu institusi HAM. Kedua, berbagi pengalaman juga bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan yang ada yang juga dimiliki oleh institusi HAM lain. Pengalaman Heba Farid (ICHR, Palestina) yang mendapatkan manfaat dari interaksi dengan pihak lain di tingkat internasional dalam meningkatkan pelaksanaan hal baru dan pengembangan TPB di Palestina dapat menjadi salah satu contoh yang menarik bagi semua pihak.[127]

Selain itu, ICHR dan Komnas HAM juga menceritakan soal tantangan internal di mana TPB masih dianggap suatu pekerjaan tambahan di luar pekerjaan sehari-hari.[128] Terkait hal ini, berbagi pengalaman dengan institusi HAM lain mengenai keterkaitan dan integrasi HAM dengan TPB dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf masing-masing institusi HAM terkait dengan TPB. Ketiga, berbagi pengalaman dapat memperkuat solidaritas institusi HAM dalam mencari penyelesaian persoalannya secara bersama terhadap beberapa persoalan yang umumnya memiliki karakter yang serupa pada tiga institusi HAM pada laporan ini.[129] Misalnya, mengenai persoalan koordinasi dan kekompakan antar lembaga dalam menjalankan TPB di suatu negara termasuk di dalamnya peran institusi HAM.[130]

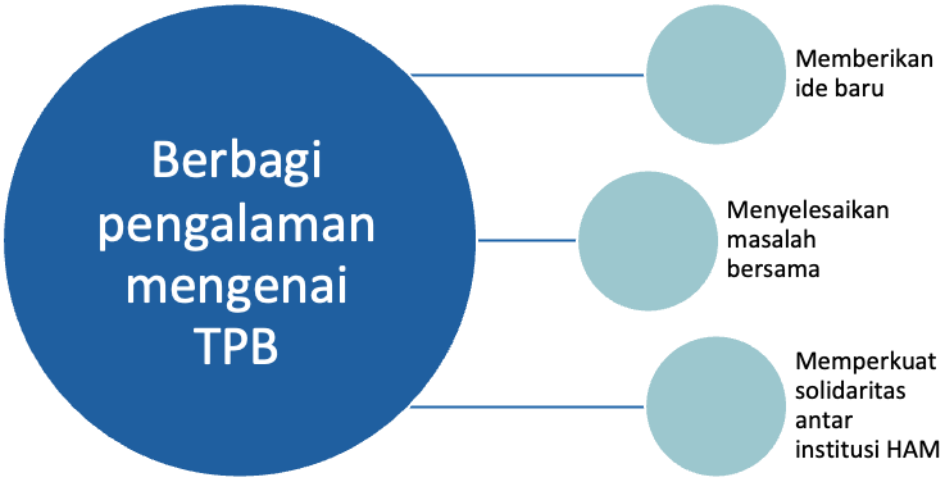


Diagram 3	Kesimpulan Berbagi Pengalaman Mengenai TPB

[127] Ibid.
[128] (1) “DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesia” (n. 16); dan (2) “Palestine’s ICHR Zoom Interview” (n. 91).
[129] Lihat Bab 2-4.
[130] Ibid.

Rekomendasi

- Pelaksanaan berbagi pengalaman institusi HAM disarankan dapat dilakukan secara berkala. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Kegiatan dapat dilakukan secara luring maupun daring. Pihak yang terlibat bisa dimulai secara bilateral antara institusi HAM di dua negara atau secara multilateral dengan lebih dari dua negara dengan cakupan pada misalnya keanggotaan Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF) ataupun negara lain di luar APF.
- Pelaksanaan kegiatan berbagi pengalaman ini baiknya dilakukan secara terencana yang masuk ke dalam program para pihak yang melakukan kolaborasi. Diperlukan perjanjian kerja sama yang memuat rencana kegiatan dalam menjalankan kegiatan ini. Pada rencana kegiatan tersebut, misalnya dapat dilakukan identifikasi isu bersama dan isu yang menjadi kekhasan institusi HAM tertentu di mana nanti para pihak melakukan pembahasan atau diskusi mengenai cara penyelesaiannya. Pembahasan ini diharapkan dapat berproses menjadi suatu praktik terbaik yang dapat digunakan pihak lain dalam mengatasi persoalan TPB di negaranya.

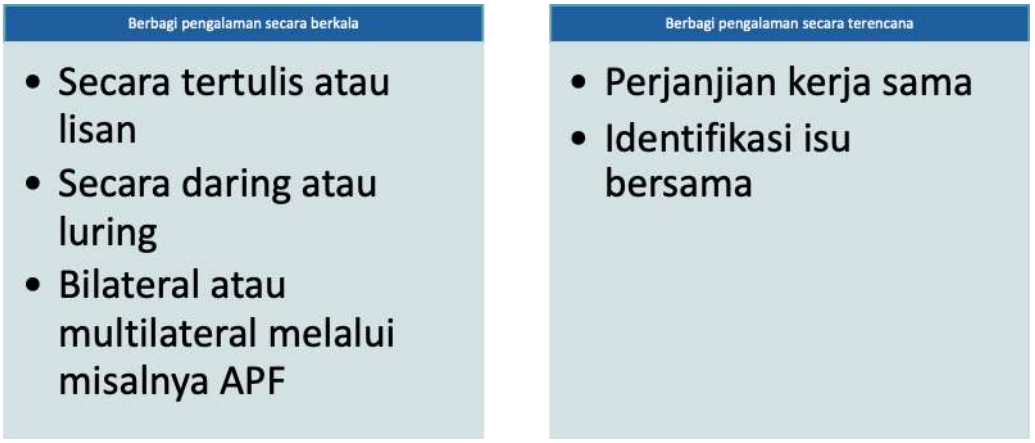


Diagram 4	Rekomendasi terkait Berbagi Pengalaman Mengenai TPB

DAFTAR PUSTAKA

"Follow Up Study on Komnas HAM's Survey on NHRIs in Asia Pacific". Pertanyaan tertulis dilakukan oleh Tim Peneliti pada penelitian ini berkolaborasi dengan DIHR dan Komnas HAM, pertanyaan tertulis dikirimkan pada tanggal 12 November 2021 dan dijawab pada tanggal 14 November 2021 oleh perwakilan Palestina dan pada tanggal 16 November 2021 oleh perwakilan Kirgistan.

"Our Members". Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions. Diakses tanggal 23 Oktober 2021. asiapacificforum.net.

"Questions on SDG related Experiences since January 2020". Survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti, Danish Institute for Human Rights, dan Komnas HAM, 22 November 2021.

Azarbekov, Askat. "Sustainble Development Goals in the Kyrgyz Republic: Challenges and Aspirations" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021).

Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM. "NHRI Survey on SDGs" (2020).

Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM. "Summary of Respondents from the Asia-Pacific Region to the NHRI.EU SDG Survey" (2020).

Danish Institute for Human Rights dan Komnas HAM. "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context". YouTube video. Diakses tanggal 9 Desember 2021. https://www.youtube.com/watch?v=v41YMZqv0rg.

Danish Institute for Human Rights. "Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights: NHRI Initiatives in the Asia Pacific Region" (2020).

Farid, Heba (Monitoring, Evaluation, and Databases Officer of the Independent Commission of Human Rights). "Palestine's ICHR Zoom Interview." Wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti (Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, dan Fidela Gracia) dengan Heba Farid pada tanggal 14 Desember 2021.

Farid, Heba (Monitoring, Evalutaion, and Databases Officer of the Independent Commission of Human Rights). Surat elektronik kepada Ulya Yasmine Prisandani, "RE: Follow-Up Interview & List of Question for 14 December 2021" (17 Desember 2021).

Farid, Heba. "The Role of NHRIs in Monitoring SDG achievements in their national context" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of

NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021).

Hartono, Mimin Dwi (Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM) dan Sri Nur Fathya (Sub-Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Lembaga / Pranata Humas Muda Komnas HAM). "DIHR Project Interview - NHRI Role with Indonesi". Wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti (Handa S. Abidin, Ulya Yasmine Prisandani, dan Fidela Gracia) dengan Mimin Dwi Hartono dan Sri Nur Fathya pada tanggal 21 Desember 2021.

Hartono, Mimin Dwi. "The Role of Komnas HAM in Monitoring and Advancing SDGs Achievement in Indonesia" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "The Role of NHRIs in Monitoring SDGs Achievements in their National Context") (22 November 2021).

Hartono, Mimin Dwi. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemajuan serta Penegakan HAM: Pembelajaran dan Langkah ke Depan" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia") (20 Desember 2021).

Komnas HAM. "Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" (2021).

Komnas HAM. "Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." YouTube video, menit ke 27-48. Diakses tanggal 9 Januari 2021. http://www.youtube.com/watch?v=xJl6vfguTow .

Komnas HAM. "Podcast #EPS 32: SDGs dan Anak Muda, YouTube video". Diakses tanggal 29 Desember 2021. https://www.youtube.com/watch?v=LJPx_cbogYU .

Moniaga, Sandrayati. "Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia" (Presentasi PowerPoint pada Webinar "Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Tinjauan Umum Sustainable Development Goals dan HAM") (17 Desember 2021).

Ombudsman Kygyzstan. "Diskusi meja bundar - Realization of Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic". 18 Agustus 2021. Diakses tanggal 29 Desember 2021. https://www.facebook.com/photo/?fbid=2933200863559751&set=pcb.2933201240226380.

Ombudsman Kyrgyzstan. "The IV meeting of the Eurasian 2020 Eurasian Alliance". Konten Facebook Ombudsman Kyrgyzstan, 18 November 2020. Diakses tanggal 29 Desember 2021. https://www.facebook.com/om

budsmankr.

Prisandani, Ulya Yasmine. surat elektronik kepada Askat Azarbekov (Ombudsman Kyrgyzstan). “Further Questions for Kyrgyz Ombudsman: Survey for Follow Up Study of NHRI.” 16 Desember 2021.

Silva, Natasha de (Australian Human Rights Commission). surat elektronik kepada Ulya Yasmine Prisandani. “RE: NHRI Follow-Up Survey for the Australian Human Rights Commission.” 8 November 2021.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2020. “Laporan Tahunan Komnas HAM 2020” (2021).

Webinar “Kampanye Internal Sustainable Development Goals di Komnas HAM: Sustainable Development Goals dalam Konteks Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.” 20 Desember 2021.


KOMNAS HAM RI